

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN MANDATORY SPENDING BIDANG PENDIDIKAN PADA KABUPATEN MURUNG RAYA

Viotama Febrian

NPP. 31.0643

Asdaf Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah

Program Studi Keuangan Publik

Email: viotamaf@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Elvira Mulya Nalien, S.IP, M.Si.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The regulation stipulated in Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System mandates all local governments, including Murung Raya Regency, to allocate 20 percent of the Regional Revenue and Expenditure Budget for Mandatory Spending, particularly in the Education Sector. **Purpose:** This research aims to determine whether the use of Mandatory Spending in the Education Sector has been effective, discussed using Mardiasmo's Effectiveness Theory, the inhibiting factors, and the efforts made by Murung Raya Regency to overcome these obstacles. **Methods:** This research employs a Descriptive Qualitative approach. Primary data collection was done through Semi-Structured Interviews with informants selected using Purposive Sampling techniques and through Moderate Participant Observation. Secondary data was obtained by processing relevant data such as the Budget Realization Report (LRA) and summaries of the policies from the Department of Education and Culture. **Results:** The use of Mandatory Spending in the Education Sector is considered effective, with three out of four effectiveness indicators being met. The indicators that have been effective are Rehabilitation of Facilities and Infrastructure, Teacher Professional Allowances, and Physical Special Allocation Fund (DAK) for the Education Sector. The only indicator that has not been effective is the Net Enrollment Rate (NER). The factors hindering the effectiveness of the NER indicator include the schools' lack of understanding of the technical activities to improve NER and the high number of school-age children opting for early marriage instead of continuing their education. The efforts of the Department of Education and Culture of Murung Raya Regency to address these obstacles include direct field visits, school socialization, implementation of regular and special programs, and synchronization of these programs. **Conclusion:** The research on the use of Mandatory Spending in the Education Sector in Murung Raya Regency in 2022 shows effectiveness in three out of four indicators—rehabilitation of facilities, teacher allowances, and the DAK physical indicator—however, the NER at the junior high school level has not been effective due to the schools' lack of technical understanding, which has been addressed by the Department of Education through training, socialization, technical guidance, and program synchronization.

Keywords: Effectiveness, Mandatory Spending, Education, Budget Utilization.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Melalui regulasi yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan kepada seluruh pemerintah daerah termasuk Kabupaten Murung Raya untuk mengalokasikan 20 persen dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah untuk Mandatory Spending khususnya Bidang Pendidikan. **Tujuan:** penelitian ini untuk mengetahui apakah penggunaan anggaran Mandatory Spending Bidang Pendidikan telah efektif dimana peneliti membahasnya dengan menggunakan Teori Efektivitas menurut Mardiasmo, faktor penghambat serta upaya yang telah dilakukan Kabupaten Murung Raya untuk mengatasi penghambat tersebut. **Metode:** Pendekatan penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif. Pengumpulan Data Primer dengan cara pertama, Wawancara Semi Terstruktur dimana penentuan informan menggunakan teknik Purposive Sampling. Kedua melalui proses Observasi Partisipatif Moderat. Sedangkan Data Sekunder dengan mengolah data-data terkait seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rangkuman Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. **Hasil/Temuan:** Penggunaan Anggaran Mandatory Spending Bidang Pendidikan dinilai sudah efektif dengan memperhatikan tiga dari empat indikator efektivitas telah efektif. Adapun indikator yang telah efektif adalah Rehabilitasi Sarana dan Prasarana, Tunjangan Profesi Guru dan DAK Fisik Bidang Pendidikan Satu-satunya indikator yg belum efektif adalah Angka Partisipasi Murni. Faktor yang menghambat Indikator APM belum efektif disebabkan kurang pahamiannya pihak sekolah terhadap teknis kegiatan peningkatan APM serta banyaknya anak-anak umur wajib sekolah yang lebih memilih pernikahan dini sehingga tidak melanjutkan pendidikan. Upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya untuk mengatasi penghambat tersebut adalah dengan turun langsung ke lapangan, sosialisasi ke sekolah-sekolah, pelaksanaan program rutin dan khusus serta sinkronisasi program-program tersebut. **Kesimpulan:** Penelitian tentang anggaran Mandatory Spending Bidang Pendidikan di Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 menunjukkan efektivitas pada tiga dari empat indikator rehabilitasi sarana, tunjangan guru, dan indikator DAK fisik, namun APM jenjang SMP belum efektif akibat kurangnya pemahaman teknis sekolah, yang diatasi Dinas Pendidikan dengan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan sinkronisasi program.

Kata kunci: Efektivitas, Mandatory Spending, Pendidikan, Penggunaan Anggaran

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Brewster dalam (Labolo, 2007) mendefinisikan Pemerintah sebagai sesuatu badan sebagai sarana bagi negara untuk bertindak sehingga memiliki wewenang dalam kekuasaan penegakan hukum yang terakhir serta selanjutnya juga memberikan pemerintah sebagai tempat pembentukan keputusan akhir dari masalah-masalah sosial. Menurut (Sedarmayanti, 2011) pemerintahan atau Government yaitu suatu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau negara kota dan sebagainya. Oleh karena itu Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan merupakan proses berkelanjutan guna menghasilkan kualitas yang berkesinambungan. Pendidikan ditujukan pada perwujudan sosok manusia masa depan dalam menghadapi perubahan yang tidak bisa di hindarkan

serta sangat sulit untuk diramalkan. Perubahan disebabkan oleh tuntutan perkembangan zaman yang mempengaruhi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) terhadap pola tujuan pendidikan serta strategi dalam mencapainya. Tujuan pendidikan idealnya mengembangkan kemampuan mental yang memungkinkan peserta didik dapat menerima pelajaran bukan menitikberatkan pada hasil. Pendidikan selalu bersinggungan dengan manusia yang menjadi subjek dan penerima yang saling mempengaruhi (Hamzah B. Uno, 2016). Pendidikan dari sisi lain adalah tahapan yang penting dalam mewujudkan kesejahteraan manusia dari segala sisi, baik kualitas hidup bahkan mendukung kemakmuran ekonomi. Pendidikan merupakan sektor dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga negara (Margaretha & Simanjuntak, 2020).

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan juga peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Fungsi yang di jelaskan di atas menunjukkan bahwa pendidikan nasional Indonesia lebih mengedepankan akan pembangunan sikap, karakter dan transformasi nilai-nilai filosofis negara Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi kebodohan dan kemiskinan yang sangat berdampak besar bagi pengaruh perkembangan masa depan, tidak hanya untuk diri sendiri, bahkan dapat berpengaruh bagi bangsa dan negara (Widya et al., 2019). Memperhatikan pentingnya pendidikan bagi suatu negara maka kecerdasan masyarakat menjadi syarat mutlak yang harus dicapai oleh negara. Hal tersebut juga merupakan salah satu cita-cita dan tujuan negara sebagaimana telah tertuang di dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 alinea ke empat yang salah satunya telah secara jelas dan tegas disebutkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa (Anggreni, 2023)

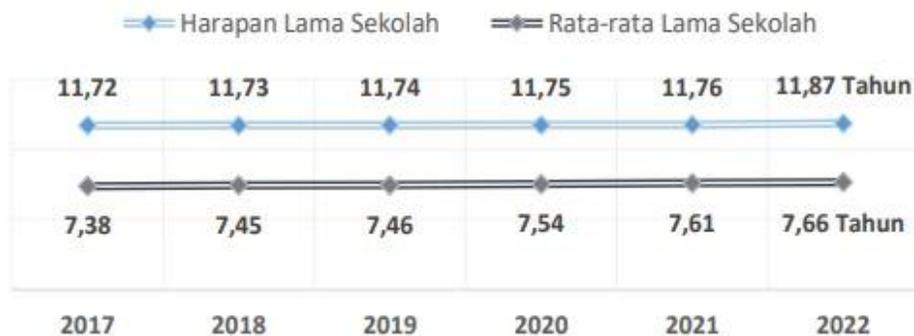
Menurut hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di bahas dalam yuridis konstitusional secara khusus tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memiliki makna bahwa pendidikan adalah sebuah usaha sadar serta terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran guna peserta didik dengan secara aktif dapat mengembangkan potensi diri guna memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengembangan diri serta kecerdasan dan ketrampilan yang dibutuhkan bagi dirinya serta lingkungan dan negara. Pasal 3 pada regulasi ini juga menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik. Perkembangan dimaksud di atas ialah menjadi manusia yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pemerintah pada hakikatnya memiliki tugas dan fungsi yang melekat dalam bidang pendidikan yakni dalam melaksanakan fungsi distribusi, stabilisasi serta alokasi. Penyelenggaraan Pemerintah dalam bidang ini merujuk pada fungsi alokasi yang mana pemerintah harus menyediakan barang publik atau proses sumber daya untuk digunakan dalam pengembangan pendidikan yang dilakukan dengan baik dalam mekanisme koordinasi, sinkronisasi dan sinergi pada tiap tingkatan pemerintah (Widodo, 2014)

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Kalimantan Tengah Pada tahun 2020 APM ada pada angka 88,78 persen. Kemudian pada tahun 2021 meningkat, yang mana APM naik menjadi 88,90 persen. Selanjutnya, Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Murung Raya Pada tahun 2020 APM ada pada angka 83,3 persen. Kemudian pada tahun 2021 menurun, yang mana APM turun menjadi 82,4 persen. Tren penurunan APM di tingkat kabupaten ini menunjukkan adanya permasalahan atau hambatan yang mempengaruhi Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Murung Raya. Pemenuhan urusan bidang pendidikan tidak terlepas dengan alokasi anggaran bidang pendidikan yang terbagi menjadi dua jenis yakni alokasi murni yang bersumber dari APBD dan alokasi yang bersumber dari transfer ke daerah sehingga dalam pemantauan pelaksanaan mandatory spending daerah sudah patuh atau belum secara maksimal. Perhatian dan fokus pemerintah dalam memenuhi urusan pelayanan dasar bidang pendidikan yang tertuang dalam anggaran yang di alokasikan akan berdampak nyata terhadap kualitas pendidikan di daerah. Kualitas pendidikan dimaksud dapat dilihat pada capaian-capaian serta kondisi eksisting yang terjadi di Kabupaten Murung Raya seperti data dibawah ini:

Diagram 1.1
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Murung raya Tahun 2022 (dalam persen)

IPM 2022: Kab. 68,63 Prov. 71,63 Nas. 72,91



Sumber : diakses dari <https://npd.kemdikbud.go.id>, 2023

Berdasarkan data IPM di atas menunjukkan Kabupaten Murung Raya belum mencapai target atau belum berada pada angka yang baik. Berdasarkan United Nations Development Program (UNDP). Kategori IPM 68,63 seperti data di atas tergolong rendah. Pemerintah Daerah dari segi keuangan setiap tahunnya mengalokasikan dana untuk urusan pendidikan yang merupakan keharusan atau kewajiban pemerintah untuk membiayai yang juga termasuk di dalamnya pengalokasian anggaran sebesar 20 persen dari APBD.

1.3 Penelitian Terdahulu

- 1) Efektivitas Penggunaan Anggaran Mandatory Spending Bidang Pendidikan pada Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sangat tergantung pada pengawasan dan akuntabilitas. Tanpa sistem pengawasan yang kuat, dana yang dialokasikan untuk pendidikan dapat disalahgunakan atau tidak dimanfaatkan secara optimal. Sebuah studi oleh Yudha dan Setiawan (2020) menemukan bahwa kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran pendidikan dapat menyebabkan pemborosan dan penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
- 2) Aspek partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran juga memengaruhi efektivitasnya. Berdasarkan penelitian oleh Wulandari et al. (2019), terlibatnya masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana pendidikan dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan penggunaan yang lebih efektif.
- 3) Selain itu, kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam administrasi dan pengelolaan keuangan juga berperan penting. Penelitian oleh Kusumawardhani (2021) menemukan bahwa kurangnya SDM yang terampil dalam manajemen keuangan publik dapat menghambat efektivitas penggunaan anggaran.
- 4) Faktor politik juga dapat memengaruhi efektivitas penggunaan anggaran pendidikan. Penelitian oleh Pratiwi (2018) menyoroti bahwa adanya perubahan kepemimpinan atau pergeseran kebijakan politik dapat mengganggu kontinuitas program pendidikan dan mempengaruhi alokasi anggaran secara tidak efektif.
- 5) Pentingnya alokasi anggaran yang proporsional antara biaya operasional dan investasi jangka panjang juga harus dipertimbangkan. Studi oleh Aditya et al. (2022) menunjukkan bahwa fokus pada investasi jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur pendidikan, dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan.
- 6) Dalam konteks Kabupaten Murung Raya, perhatian khusus harus diberikan pada pemerataan akses pendidikan. Penelitian oleh Utama (2020) menemukan bahwa adanya kesenjangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan dapat menghambat pencapaian efektivitas penggunaan anggaran pendidikan.
- 7) Evaluasi yang berkala terhadap program-program pendidikan yang didanai oleh anggaran mandatory spending perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan dan target pendidikan tercapai secara efektif. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Setiawan et al. (2021), yang menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap program pendidikan.
- 8) Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan stakeholders lainnya dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran pendidikan. Studi oleh Purnamasari (2023) menyoroti bahwa sinergi antara berbagai pihak dapat memaksimalkan hasil dari setiap rupiah yang diinvestasikan dalam pendidikan.
- 9) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pendidikan juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Menurut penelitian oleh Wardhani (2022), adopsi praktik-praktik transparan dalam pengelolaan anggaran dapat membantu mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan dana.

10) Terakhir, penting bagi pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya untuk memprioritaskan penggunaan anggaran pada inovasi pendidikan dan peningkatan kualitas guru. Penelitian oleh Santoso (2021) menunjukkan bahwa investasi dalam pelatihan dan pengembangan guru dapat memiliki dampak yang signifikan pada peningkatan mutu pendidikan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Dalam konteks pernyataan kebaruan ilmiah, analisis terkait efektivitas penggunaan anggaran mandatory spending bidang pendidikan pada Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, menawarkan kontribusi yang signifikan terhadap pengetahuan dan pemahaman dalam bidang administrasi keuangan publik dan pendidikan lokal. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan tentang pengelolaan anggaran pendidikan, penelitian ini membawa fokus khusus pada situasi yang unik di Kabupaten Murung Raya, sebuah daerah yang mungkin memiliki tantangan dan dinamika tersendiri dalam pengelolaan dana pendidikan. Dengan menggabungkan analisis tentang aspek pengawasan, partisipasi masyarakat, kapasitas SDM, faktor politik, alokasi anggaran yang proporsional, dan evaluasi program, penelitian ini membuka ruang baru untuk pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan memengaruhi efektivitas penggunaan anggaran pendidikan di tingkat lokal.

Penelitian ini juga menghadirkan kontribusi baru dalam upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Dengan menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan stakeholders lainnya, serta investasi dalam peningkatan kualitas guru, penelitian ini memberikan pandangan baru tentang bagaimana praktek-praktek terbaik dalam pengelolaan anggaran pendidikan dapat diimplementasikan dalam konteks Kabupaten Murung Raya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis terhadap literatur tentang administrasi keuangan publik dan pendidikan, tetapi juga memberikan wawasan praktis yang dapat membantu pembuat kebijakan dan praktisi di lapangan dalam meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran pendidikan di tingkat lokal.

1.5 Tujuan

Tujuan dari analisis ini adalah untuk menyelidiki efektivitas penggunaan anggaran mandatory spending bidang pendidikan pada Kabupaten Murung Raya, Provinsi Sumatera Selatan, dengan tujuan utama untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan anggaran tersebut dan bagaimana hal itu mempengaruhi kualitas pendidikan lokal. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diidentifikasi kebijakan dan praktik terbaik yang dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran pendidikan, serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan stakeholders lainnya dalam upaya meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pendidikan di Kabupaten Murung Raya.

II. METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan kerangka berpikir induktif. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk

memahami masalah secara mendalam, sementara metode deskriptif memungkinkan untuk menjelaskan status atau kondisi yang diamati. Dengan menggunakan kerangka berpikir induktif, penelitian akan dimulai dengan pengamatan khusus untuk kemudian menarik kesimpulan yang lebih luas berdasarkan pada hasil observasi dan fakta yang terkumpul. Dengan pendekatan ini, studi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas penggunaan anggaran mandatory spending di bidang pendidikan di Kabupaten Murung Raya.

Operasionalisasi konsep efektivitas penggunaan anggaran mandatory spending bidang pendidikan di Kabupaten Murung Raya mengacu pada dua dimensi: pengukuran output dan pengukuran outcome. Dimensi pengukuran output mencakup rehabilitasi sarana pendidikan dan peninjauan terhadap tunjangan profesi guru. Sementara itu, dimensi pengukuran outcome berfokus pada peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di bidang pendidikan. Dengan operasionalisasi ini, penelitian dapat secara sistematis mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran mandatory spending dalam sektor pendidikan, memungkinkan untuk analisis yang lebih terperinci dan perbandingan hasil antara daerah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer akan diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan, sementara data sekunder akan diperoleh dari dokumen seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022 serta rangkuman kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya. Selain itu, informasi juga akan diperoleh melalui berita dan website terkait. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, di mana informan dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti pemahaman mereka terhadap permasalahan yang diteliti. Informan kunci yang akan diwawancarai termasuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, dan Kepala Bidang PAUD. Dengan demikian, penelitian ini akan menggabungkan berbagai sumber data dan teknik sampling untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan mendalam mengenai efektivitas penggunaan anggaran mandatory spending di bidang pendidikan di Kabupaten Murung Raya.

Peneliti memainkan peran utama sebagai instrumen dalam mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Meskipun terdapat instrumen lain seperti angket atau pedoman observasi, peran peneliti sebagai instrumen kunci tetaplah penting. Kehadiran peneliti di lapangan perlu dijelaskan apakah diketahui atau tidak oleh subyek penelitian, dan keterlibatan peneliti dapat bersifat aktif atau pasif. Instrumen penelitian meliputi panduan wawancara mendalam dan alat rekaman seperti tape recorder atau kamera untuk merekam hasil wawancara atau observasi. Pedoman wawancara berisi pertanyaan deskriptif dan struktural, sementara alat rekaman digunakan untuk mencatat hasil wawancara mendalam. Dalam penelitian ini, instrumen penelitian terdiri dari pedoman wawancara dan observasi karena digunakan untuk mengumpulkan data primer melalui proses wawancara dan observasi.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Tugas pengumpulan data dimulai setelah masalah penelitian telah didefinisikan dan desain penelitian telah dihubungkan keluar, bagian ini

mempertimbangkan cara untuk memperoleh data lapangan kualitatif yang baik (Kothari, 2004). Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi

Pelaksanaan penelitian bertujuan untuk mengungkap fenomena dalam kehidupan sosial masyarakat, memerlukan analisis data yang terperinci. Proses analisis data dimulai sejak merumuskan masalah, dapat dilakukan selama pengumpulan data berlangsung, dan berlanjut hingga penulisan hasil penelitian. Tahapan analisis data meliputi reduksi data, di mana data yang diperoleh dari lapangan disederhanakan untuk memfokuskan pada hal-hal penting, penyajian data dalam berbagai bentuk seperti uraian singkat atau bagan, dan terakhir pengambilan kesimpulan dan verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektivitas Penggunaan Anggaran Mandatory Spending Bidang Pendidikan Pada Kabupaten Murung Raya

Efektivitas dinilai berdasarkan capaian suatu program dalam menghasilkan output atau keluaran apakah sudah sesuai dengan harapan atau belum. Adapun tolak ukur penentuan efektivitas ini ditentukan berdasarkan rencana yang ditargetkan agar selesai sesuai ketentuan yang ditentukan, baik dalam hal ini mencakup waktu dan biayanya maupun kualitasnya sehingga dapat dikatakan efektif (Mardiasmo, 2002). Peneliti berupaya melihat efektivitas berdasarkan dua dimensi diatas beserta indikator yang tersedia sehingga dapat dianalisis dengan lebih rinci sebagai berikut:

3.1.1 Pengukuran *Output*

Pengukuran output merupakan aspek penting dalam mengevaluasi hasil atau prestasi dari suatu sistem atau aktivitas, termasuk dalam konteks pendidikan. Dalam upaya untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan pendidikan, penting untuk memantau dan menilai pencapaian dalam hal sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu indikator yang digunakan adalah rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan. Melalui wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya, didapatkan informasi tentang upaya rehabilitasi yang telah dilakukan pada berbagai sekolah, yang didukung oleh data realisasi anggaran. Penyaluran dana untuk rehabilitasi tersebut telah mencapai tingkat efektivitas yang baik, dengan sebagian besar anggaran telah terserap dan pembangunan fisik sarana pendidikan yang telah terlihat melalui foto-foto dokumentasi.

Selain rehabilitasi sarana dan prasarana, tunjangan profesi guru juga menjadi fokus dalam pengukuran output dalam pendidikan. Tunjangan profesi guru merupakan salah satu insentif yang diberikan kepada guru sebagai penghargaan atas kinerja profesional mereka. Melalui kerja sama dengan pihak ketiga dan alokasi anggaran yang signifikan, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kualitas SDM guru dan kesejahteraan mereka. Realisasi anggaran untuk tunjangan profesi guru pada tahun 2022 mencapai angka yang memuaskan, menunjukkan komitmen dalam mendukung pengembangan profesionalisme guru.

Dengan demikian, melalui pengukuran output yang terfokus pada rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan serta pemberian tunjangan profesi guru, Kabupaten Murung Raya menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Data-data yang telah disajikan, baik melalui

wawancara, foto dokumentasi, maupun realisasi anggaran, menjadi landasan yang kuat untuk mengukur efektivitas dan efisiensi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

3.1.2 Pengukuran *Outcome*

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program dan alokasi anggaran telah menunjukkan hasil yang cukup efektif. Program Kartu Murung Raya Cerdas (KMC), yang telah berjalan sejak tahun 2014, memberikan bantuan kepada siswa berprestasi dan tidak mampu dengan total penerima manfaat mencapai 75.121 orang hingga tahun 2023. Selain itu, alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada tahun 2022 telah berhasil mendukung pembangunan infrastruktur sekolah dengan tingkat realisasi anggaran mencapai lebih dari 95% untuk TK, SD, dan SMP.

Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) juga menunjukkan tingkat realisasi yang baik, mengindikasikan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan pendidikan di daerah tersebut. Dari data yang disajikan, terlihat bahwa pembangunan infrastruktur sekolah seperti ruang kelas dan ruang guru telah berlangsung dengan baik, sesuai dengan alokasi anggaran yang telah diberikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun masih ada indikator tertentu yang perlu diperhatikan lebih lanjut, secara keseluruhan penggunaan anggaran Mandatory Spending Bidang Pendidikan di Kabupaten Murung Raya, terutama pada tahun 2022, dapat dianggap telah berlangsung cukup efektif. Langkah-langkah ini diharapkan dapat terus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat setempat.

3.2 Faktor yang Menjadi Penghambat Efektivitas Penggunaan Anggaran Mandatory Spending Bidang Pendidikan di Kabupaten Murung Raya

Dari pembahasan di atas, terungkap bahwa salah satu faktor penghambat efektivitas peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Murung Raya adalah rendahnya pemahaman teknis di kalangan sekolah terkait dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan APM. Hal ini diakui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya, yang menekankan pentingnya sinkronisasi program dan pelatihan langsung kepada sekolah. Namun, tantangan ini tidak hanya terkait dengan aspek teknis, tetapi juga dengan fenomena pernikahan dini di kalangan anak-anak usia wajib belajar.

Menurut Kepala Bidang Pendidikan Dasar, rendahnya APM juga dipengaruhi oleh fenomena putus sekolah, terutama diakibatkan oleh pernikahan dini. Data angka putus sekolah yang disajikan menunjukkan bahwa tantangan ini nyata, dengan 27 siswa SD dan 10 siswa SMP yang mengalami putus sekolah pada tahun 2022. Pernikahan dini menjadi pemicu kuat rendahnya partisipasi pendidikan, menghentikan langkah anak-anak dalam mengejar pengetahuan dan kemandirian.

Oleh karena itu, untuk mengatasi rendahnya APM dan tingginya angka putus sekolah, perlu adanya pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sekolah, masyarakat, dan keluarga. Langkah-langkah yang diambil harus tidak hanya fokus pada aspek teknis program pendidikan, tetapi juga pada upaya pencegahan pernikahan dini dan perlindungan anak-anak dari risiko putus sekolah. Dengan demikian, akan tercipta lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan kondusif bagi setiap anak untuk meraih masa depan yang lebih baik.

3.3 Upaya Yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya untuk Mengatasi Faktor Penghambat

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) di daerah tersebut. Melalui pelatihan langsung ke lapangan, sosialisasi di sekolah-sekolah, serta program-program rutin dan khusus seperti ANBK dan program pelatihan, Dinas Pendidikan berupaya secara aktif untuk memberikan dukungan dan pemahaman kepada sekolah-sekolah terkait pentingnya APM. Hal ini menunjukkan pendekatan yang holistik dalam menangani tantangan pendidikan di tingkat dasar.

Meskipun demikian, upaya-upaya tersebut masih dihadapkan pada hambatan yang signifikan, terutama terkait dengan fenomena pernikahan dini di kalangan pelajar. Pernikahan dini menjadi salah satu faktor utama yang menghambat partisipasi pendidikan, terutama di usia wajib sekolah. Oleh karena itu, langkah-langkah yang lebih luas dan berkelanjutan perlu diambil oleh berbagai pihak terkait untuk mengatasi masalah ini. Ini melibatkan kerja sama antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan keluarga dalam upaya meminimalisir praktik pernikahan dini di kalangan remaja.

Dengan terus menerapkan strategi-strategi yang efektif dan memperkuat kerja sama lintas sektor, diharapkan bahwa tantangan rendahnya APM dan fenomena pernikahan dini dapat diatasi secara bertahap. Ini akan membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan mendukung bagi setiap anak di Kabupaten Murung Raya untuk meraih potensi penuh mereka dan memperoleh pendidikan yang layak.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Diskusi temuan utama penelitian menyoroti hasil analisis dan implikasi dari data yang telah dikumpulkan dan disajikan. Dalam penelitian ini, temuan utama berkaitan dengan efektivitas upaya pemerintah daerah, terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya, dalam meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) dan mengatasi faktor-faktor penghambat seperti pernikahan dini. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya yang signifikan, masih ada tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait dengan pemahaman teknis di tingkat sekolah dan fenomena pernikahan dini yang mempengaruhi partisipasi pendidikan.

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya pendekatan yang lebih holistik dan terkoordinasi dalam mengatasi masalah APM dan pernikahan dini. Pemerintah daerah perlu terus meningkatkan pelatihan dan sosialisasi di tingkat sekolah, sambil bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk

mengidentifikasi dan mengatasi akar masalah yang mendasari rendahnya APM, seperti pernikahan dini. Dengan demikian, upaya-upaya ini diharapkan dapat menghasilkan perubahan positif yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi pendidikan dan kesejahteraan siswa di Kabupaten Murung Raya.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama, terdapat beberapa temuan menarik lainnya yang patut diperbincangkan dalam penelitian ini. Salah satunya adalah efektivitas penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang pendidikan dalam membangun infrastruktur sekolah di Kabupaten Murung Raya. Temuan ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran DAK Fisik telah diserap dengan baik, dengan persentase realisasi yang tinggi pada tahun 2022. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung proses belajar-mengajar yang lebih baik.

Selain itu, temuan menarik lainnya adalah tantangan yang dihadapi dalam mengatasi angka putus sekolah, terutama di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Fenomena pernikahan dini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi pendidikan di kalangan anak-anak di Kabupaten Murung Raya. Implikasinya, selain upaya pemerintah dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa, juga perlu adanya kerja sama lintas sektor untuk mengatasi akar masalah seperti pernikahan dini. Dengan demikian, penanganan permasalahan ini dapat menjadi lebih holistik dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Penggunaan anggaran Mandatory Spending Bidang Pendidikan di Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 telah efektif dibuktikan dengan tiga dari empat indikator dinilai efektif. Adapun tiga indikator tersebut yakni Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Tunjangan Profesi Guru dari Dimensi Pengukuran Output, Indikator DAK Fisik Bidang Pendidikan dari Dimensi Outcome. Adapun indikator yang belum efektif ialah Peningkatan Angka Partisipasi Murni dari Dimensi Outcome.

Faktor penghambat yang penulis temukan dari penelitian ini adalah pihak sekolah yang belum sepenuhnya mengetahui teknis dari program-program Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) yang di tandai dengan APM masih di bawah 80 persen pada jenjang SMP. Selain Itu juga disebabkan banyaknya para remaja umur wajib sekolah melakukan pernikahan dini dibanding melanjutkan pendidikan.

Upaya yang telah dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengatasi penghambat tersebut yaitu melakukan pelatihan langsung ke lapangan, sosialisasi di sekolah-sekolah, pelaksanaan program rutin dan khusus bimbingan teknis serta sinkronisasi program-program tersebut untuk memastikan efektivitasnya.

Keterbatasan Penelitian. Meskipun penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Murung Raya, ada beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini terbatas pada analisis data sekunder dan wawancara dengan pihak terkait, sehingga mungkin ada faktor-faktor lain yang tidak terungkap sepenuhnya. Kedua, fokus penelitian hanya pada Kabupaten Murung Raya sehingga generalisasi temuan ini mungkin terbatas pada konteks tersebut dan tidak dapat langsung diterapkan pada wilayah lain. Terakhir, waktu penelitian yang terbatas mungkin membatasi kedalaman analisis dan pemahaman terhadap isu-isu kompleks yang terkait dengan pendidikan di daerah tersebut. Dengan memahami keterbatasan ini, penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan dan mendalami analisis untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Untuk penelitian masa depan, ada beberapa arah yang bisa dieksplorasi untuk memperluas pemahaman tentang upaya peningkatan kualitas pendidikan di daerah seperti Kabupaten Murung Raya. Pertama, penelitian dapat melibatkan survei atau wawancara lebih lanjut dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti guru, orang tua siswa, dan siswa sendiri, untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang tantangan dan keberhasilan program-program pendidikan yang dilaksanakan. Selanjutnya, penelitian dapat memperluas cakupan geografisnya untuk membandingkan strategi dan hasil dari berbagai daerah, baik di tingkat regional maupun nasional. Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi praktik terbaik dan mengevaluasi efektivitas program-program pendidikan di berbagai konteks. Selain itu, penelitian masa depan juga dapat mengintegrasikan pendekatan kuantitatif, seperti analisis data statistik, untuk mendukung temuan kualitatif yang telah diperoleh. Dengan demikian, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik dan mendalam tentang dinamika pendidikan di Kabupaten Murung Raya dan wilayah-wilayah sejenisnya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan teknis dan logistik dalam pelaksanaan penelitian ini, serta kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan saran yang berharga. Semua kontribusi dan dukungan ini sangat berarti bagi kelancaran dan keberhasilan penelitian ini. Saya berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pengembangan pendidikan di Kabupaten Murung Raya dan wilayah-wilayah sekitarnya..

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, B., et al. (2022). The Impact of Public Expenditure on Education on Human Capital Development in Indonesia. *Journal of Economic Development, Environment and People*, 11(2), 49-58.
- Anggreni, N. (2023). Akibat Hukum atas Alokasi Anggaran Pendidikan yang Kurang dari 20% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 2(1), 195–215. <https://doi.org/10.59066/jmi.v2i1.425>
- Hamzah B. Uno. (2016). *Landasan Pendidikan*. Bumi Aksara

- Kemdikbud. (2023, 5 Oktober). Penelusuran Data Pendidikan. Diakses dari <https://npd.kemdikbud.go.id>
- Kothari. (2004). *Research Methodology*. New Age International Limited.
- Kusumawardhani, A. (2021). Human Resource Capacity in Public Financial Management. *Journal of Public Administration and Governance*, 11(3), 86-93.
- Labolo, M. (2007). *Memahami Ilmu Pemerintahan* (M. Labolo, Ed.; Revisi). PT Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. CV. Andi Offset.
- Margaretha, E., & Simanjuntak, R. A. (2020). Dampak Belanja Sektor Pendidikan Terhadap Kualitas Pendidikan Di Indonesia.
- Pratiwi, D. A. (2018). Political Economy Analysis of Education Budgeting in Indonesia. *Journal of Public Finance and Public Policy*, 18(1), 112-125.
- Purnamasari, L. (2023). Collaborative Governance in Education: A Case Study of Partnership between Local Government and NGOs in Indonesia. *International Journal of Educational Administration*, 15(1), 45-58.
- Santoso, H. (2021). Investing in Teacher Quality: Strategies for Improving Education in Developing Countries. *Journal of Education Policy*, 28(2), 89-102.
- Sedarmayanti. (2011). *Good Governance (kepemerintahan yang baik)*. : Mandar Maju.
- Setiawan, F., et al. (2021). Evaluation of Education Programs: A Case Study in Kalimantan Tengah Province. *Journal of Educational Research and Development*, 12(2), 78-87.
- Utama, S. (2020). Addressing Education Disparities in Rural Areas: Lessons from Indonesia. *Rural Education Quarterly*, 40(3), 201-215.
- Wardhani, R. (2022). Transparency and Accountability in Education Budget Management: Lessons from Developing Countries. *International Journal of Educational Development*, 35(4), 321-335.
- Widodo, P. A. (2014). *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Belanja Pendidikan*.
- Widya, A. D. I., Pendidikan, J., & Volume, D. (2019). *Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Indonesia*. April, 29–39
- Wulandari, S., et al. (2019). Community Participation in Education Budget Monitoring: A Case Study in Indonesia. *International Journal of Community Development*, 25(2), 145-158.
- Yudha, A., & Setiawan, B. (2020). Transparency and Accountability in Public Expenditure Management: Lessons from Local Governments in Indonesia. *Journal of Public Policy and Administration*, 30(3), 201-215.